

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat biasa disebut dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional perlu membutuhkan dana yang cukup besar, agar dapat merealisasikan dari tujuan tersebut, maka yang perlu untuk diteliti yaitu masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu hal yang dapat mewujudkan suatu negara agar pembiayaan pembangunan dapat diatasi adalah dengan cara menggali sumber pendapatan yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Pajak dapat dikatakan sebagai sumber penghasilan negara yang terbesar selain dari pendapatan Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh negara. Setiap negara, berbondong-bondong untuk mendapatkan penghasilan dari sektor pajak secara besar, khususnya negara Indonesia. Pajak berkembang secara drastis setiap tahunnya. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa sampai akhir Februari Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mengalami kenaikan yang cukup drastis hingga 17,1 persen. Kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 2017 yang hanya mencapai kisaran 9,4 persen (Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Pertumbuhan Pendapatan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) terjadi akibat penerimaan pajak. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, kesadaran dan kepedulian rakyat Indonesia masih sangat minim terhadap pajak, meskipun beberapa tahun terakhir ini pajak mengalami peningkatan yang sangat bagus

dibandingkan dengan tahun lalu. Meskipun demikian mayoritas masyarakat masih tetap asing dengan yang namanya pajak. Masyarakat masih kurang pengetahuan tentang perpajakan baik cara melaksanakan ataupun cara penggunaan pajak. Ada juga masyarakat yang menganggap bahwa adanya pajak menjadikan beban karena mengurangi laba atau pendapatannya. Penyebab tersebut dapat mengakibatkan terjadinya *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Penghindaran pajak sulit diprediksi keberadaannya karena menyangkut pribadi atau aib dari suatu perusahaan, manajemen serta strategi yang dilakukan perusahaan tersebut. Tetapi, menurut Heitzman dalam Agung Wibowo et al, 2010:135 menyatakan bahwa hal tersebut dapat diukur dengan melihat seberapa besar perbedaan laba akuntansi atau laba pada umumnya di laporan keuangan dengan laba fiskal yakni laba yang sudah dikoreksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan.

Memenuhi kewajiban pajak dalam suatu perusahaan biasanya juga dipengaruhi oleh *corporate governance* atau yang biasa disebut dengan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan, yang pertama kepemilikan institusional merupakan tingkat kepemilikan saham institusional dalam suatu perusahaan (Sartono, 2010:487). Kepemilikan institusional merupakan hal yang penting dalam memonitoring atau mengawasi manajemen perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional maka pihak perusahaan akan lebih optimal dalam setiap pengambilan keputusan yang akan diambilnya.

Kedua, dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan apapun para dengan direksi atau dewan komisaris yang lain

di perusahaan tersebut. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat peraturan yang harus dipenuhi bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus memiliki kurang lebih 30 persen dewan komisaris independen.

Ketiga, kualitas audit merupakan elemen yang sangat berkepentingan dalam tata kelola perusahaan atau *corporate governance* sebab dalam prinsipnya menerapkan prinsip transparansi. Transparansi yang dimaksud yaitu keterbukaan atau pertanggung jawaban terhadap pemegang saham yang dilakukan dengan cara melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal.

Keempat, komite audit dalam struktur *corporate governance* komite audit ini menjadi salah satu komponen yang umum pada perusahaan publik. Umumnya komite audit memiliki fungsi sebagai pengawas pada proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal (Annisa & Kurniasih, 2012).

Dengan adanya empat alat pengukur pada *corporate governance* dalam suatu perusahaan publik, maka dapat membantu untuk menentukan arah kinerja dari perusahaan publik. Adapun beberapa penelitian yang mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan di Indonesia antara lain dilakukan oleh Nuraflihmida dan Lulus (2012) dengan judul pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *disproportionate stratified random sampling* karena unsur populasi berkarakteristik heterogen dan heterogenitas mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian. Hasilnya, variabel kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan

terhadap *tax avoidance*. Variabel kualitas audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fenny Winata (2014) yang berjudul pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2013. Metode yang digunakan untuk teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*, sedangkan metode statistik yang digunakan yaitu analisis linear berganda. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Calfin dan I Made (2015) dengan judul pengaruh karakter eksekutif, komit audit, ukuran persahaan, *lavergae* dan *sales growth* pada *tax avoidance*. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu berbntuk asosiatif dengan tipe kausalitas. Hasil dari penelitian ini bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avodance*, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *lverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian oleh Ngadiman dan Christiany (2014) yang berjudul pengaruh *lverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek indonesia 2010-2015. Metode yang digunakan untuk

teknik pengambilan sampel yaitu metode sampel tak acak, sedangkan metode analisis data menggunakan pengolahan data dengan cara menggunakan perhitungan matematis. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa *lavergae* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institsional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Wibowo et all (2016) yang berjudul pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan terdaftar di Indeks Bursa Sri Kehati Tahun 2010-2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory* reseach pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menelaah kausaltas antara variabel yang menunjukkan suatus fenomena tertentu. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan uji regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan komite audit, dewan komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil secara parsial yaitu dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitan ini sangat perlu dilakukan sebab pada suatu peusahaan publik pasti memiliki sebuah tata kelola perusahaan yang sangat baik. Tata kelola perusahaan yang ideal dan bagus terdiri dari adanya kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit yang berfungsi untuk mengawasi atau memonitor suatu perusahaan.

Berdasarkan beberapa penelitian dan latar belakang masalah diatas bahwa terdapat beberapa faktor yang masih perlu dibahas secara mendalam serta dapat dilakukan pada objek Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan memperpanjang rentang waktu. Pada penelitian ini peneliti mengambil perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumsi karena terdapat alasan yang mendasari bahwa pada Tahun 2017 sektor tersebut menjadi sektor saham terkuat di BEI (CNN Indonesia). Berangkat dari alasan itulah maka penelitian mengambil judul: “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017”.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan pada penelitian ini dibatasi untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini dengan pembatasannya adalah:

1. Bidang penelitian ini adalah *corporate governance* yang meliputi: kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit dengan *tax avoidance*.
2. Tempat penelitian ini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017 khususnya sektor industri barang dan konsumsi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang diuraikan diatas, maka perumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017 ?
2. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017 ?
3. Apakah terdapat pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017 ?
4. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijabarkan diatas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017.

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017.

4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi pertimbangan pihak perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang benar tanpa melanggar undang-undang perpajakan.

2. Bagi penulis

Diharapkan dapat memberikan wawasan lebih tentang permasalahan yang sudah diteliti.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *corporate governance* dan *tax avoidance*.